

PARAHYANGAN DAN PREANGERSTELSEL: EKSTRIMISME BUPATI PADA MASA PREANGERSTELSEL TAHUN 1830-1870

Mely Safitri

Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung

Email : mellysafitry25@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ekstrimisme bupati pada masa *Preangerstelsel* Tahun 1830-1870. *Preangerstelsel* merupakan tanam paksa kopi yang diberlakukan di wilayah Parahyangan. Bupati, sebagai perangkat pemerintah lokal yang memiliki peran kunci dalam sistem *Preangerstelsel*, seharusnya bertindak sebagai perantara yang adil antara pemerintah kolonial dan petani. Bupati diberi kekuasaan istimewa dari pemerintah kolonial justru menyalahgunakan kekuasaan tersebut untuk menindas rakyat pribumi. Penelitian ini menggunakan metode historis, dimana proses pemecahan masalah menggunakan jejak peristiwa sejarah atau data-data masa lampau, yang terdiri dari tahapan Heuristik yaitu pengumpulan sumber-sumber sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan sumber primer yang diambil dari delpher dan sumber sekunder yang diambil dari beberapa jurnal sebagai sumber pendukung. Tahap selanjutnya kritik yaitu pemeriksaan keaslian sumber (verifikasi), selanjutnya interpretasi yaitu menafsirkan dari sumber yang telah ada, tahap terakhir yaitu historiografi menuliskan kembali sesuai dengan sudut pandang penulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bupati Priangan telah melakukan penindasan kepada para petani pribumi dalam bentuk tanam paksa kopi. Akibat tanam paksa ini masyarakat pribumi merasa dirugikan sedangkan bupati mendapatkan kekayaan yang melimpah, seperti bupati Tjiandjoer yang menerima gaji f 3.600 yang melebihi gaji Dewan Hindia. Kopi menjadi salah satu komoditas utama yang ditanam dan dikembangkan di Indonesia karena dianggap sebagai komoditas yang penting dalam pertumbuhan ekonomi negara.

Kata kunci: *Preangerstelsel*, Bupati, Parahyangan

ABSTRACT

This research aims to determine the regent's extremism during the Preangerstelsel period 1830-1870. Preangerstelsel is forced coffee planting implemented in the Parahyangan area. The regent, as a local government apparatus who had a key role in the Preangerstelsel system, was supposed to act as a fair intermediary between the colonial government and farmers. The regent, who was given special powers from the colonial government, actually abused these powers to oppress the native people. This research uses a historical method, where the problem solving process uses traces of historical events or past data, which consists of the Heuristic stage, namely the collection of historical sources that can be accounted for using primary sources taken from delpher and secondary sources taken from several sources. journal as a supporting source. The next stage is criticism, namely checking the authenticity of the source (verification), then interpretation, namely interpreting from existing sources, the final stage is historiography,

rewriting it according to the author's point of view. The results of the research show that the Regent of Priangan has oppressed indigenous farmers in the form of forced coffee planting. As a result of this forced cultivation, the native people felt disadvantaged, while the regent received abundant wealth, such as the regent of Tjiandjoer who received a salary of f 3,600 which exceeded the salary of the Council of the Indies. Coffee is one of the main commodities grown and developed in Indonesia because it is considered an important commodity in the country's economic growth.

Keywords: Preangerstelsel, Regent, Parahyangan

PENDAHULUAN

Kedatangan bangsa Barat, terutama Belanda, ke Indonesia membawa transformasi yang meluas dalam politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Sistem politik yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai sektor yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi, dengan tujuan untuk meningkatkan kemakmuran Belanda. Salah satu aspek utama dari kebijakan ekonomi Belanda di Indonesia adalah pendirian perkebunan. (Yuan, 2018). Perkebunan merujuk pada aktivitas yang bertujuan untuk menanam dan mengelola tanaman tertentu pada lahan atau media tumbuh lainnya yang sesuai dengan kondisi ekosistem. Masyarakat asli Indonesia telah memperkenalkan sistem bercocok tanam sebelum kedatangan pemerintah kolonial Belanda. Indonesia memiliki jenis tumbuhan yang beragam karena lokasinya yang strategis dan iklim serta curah hujan yang cukup (Oktasari, 2014). Sistem perkebunan tradisional terdiri dari praktik-praktik pertanian yang bersifat sederhana, dengan modal yang tidak besar, penggunaan lahan yang terbatas, tenaga kerja yang berasal dari anggota keluarga, kurang memperhatikan pasar, dan lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan lokal. Pemerintah kolonial Belanda membuat kebijakan Sistem Tanam Paksa untuk perkebunan, yang terdiri dari usaha pertanian skala besar dan kompleks yang membutuhkan banyak modal dan menanam tanaman komersial untuk dijual ke pasar global (Yuan, 2018).

Pemerintah kolonial Jawa menggunakan perkebunan sebagai strategi untuk mengeksploitasi ekonomi dan tenaga kerja selama masa Tanam Paksa. Sistem Tanam Paksa, juga dikenal sebagai *Preangerstelsel*, dimulai pada tahun 1830 dan berlangsung hingga tahun 1870. Pada dasarnya, sistem eksploitasi ini menghidupkan kembali sistem penyampaian wajib yang ada selama masa VOC. Pemerintah kolonial Belanda membuat sistem ini untuk menghasilkan banyak keuntungan (Pratiwi & Miftahuddin, 2021). Pada masa Tanam Paksa, kopi adalah salah satu jenis tumbuhan yang telah menjadi komoditas utama sejak lama hingga sekarang. Kopi menjadi salah satu komoditas utama yang ditanam dan dikembangkan di Indonesia karena dianggap sebagai komoditas yang penting dalam pertumbuhan ekonomi negara (Oktasari, 2014). Kopi adalah tanaman yang berasal dari luar Nusantara. Pada tahun 1696, Gubernur Jenderal Joan Van Hoorn menerima biji kopi dari keluarganya yang bekerja di Malabar, India. Van Hoorn kemudian menanam biji kopi tersebut di kebunnya di Batavia dan Cirebon.

VOC merebut seluruh wilayah Parahyangan pada tahun 1705, tetapi mengawasi semua bupati melalui Pangeran Aria Cirebon. Parahyangan merupakan tempat pertama untuk uji coba tanaman kopi di Pulau Jawa. Tanah Parahyangan merupakan tanah yang subur, kemudian, karena tanaman kopi di Parahyangan membutuhkan banyak tenaga kerja dan lahan yang subur, perkebunan ini selalu memiliki produksi kopi yang tinggi dibandingkan dengan perkebunan lain di Pulau Jawa. Kopi di Keresidenan Parahyangan diberlakukan sebuah sistem, yaitu *Preangerstelsel* dari 1830 hingga 1870. *Preangerstelsel* tidak dihapus sepenuhnya ketika sistem tanam paksa dihapus dan digantikan oleh sistem liberal dan Undang-Undang Agraria Tahun 1870 diberlakukan dikarenakan sistem ini masih menguntungkan pihak Belanda. *Preangerstelsel* merupakan tanam paksa kopi yang diberlakukan di wilayah Parahyangan (de Klein, 1931).

Preangerstelsel dicetuskan oleh VOC kemudian dipertahankan oleh Deandles, secara sederhana, *preangerstelsel* ditandai dengan fakta bahwa pemerintahan Preanger tidak mengenakan pajak kepada penduduknya tetapi mewajibkan mereka untuk menanam kopi dan menyediakan pasokan kopi (Atmadja & RAAA, 1940). Pada tahun 1830, Belanda mengambil alih seluruh Pulau Jawa melalui berbagai perjanjian dengan para penguasa di daerah tersebut. Belanda secara sengaja memperkuat peran Bupati untuk menjaga struktur sosial yang menguntungkan masyarakat pribumi. Bupati memiliki kedudukan tertinggi di Kabupaten, memegang otoritas tradisional dan legal. Sebagai agen VOC, Bupati bertanggung jawab mengumpulkan tanaman perdagangan seperti kopi sesuai dengan kuota yang ditetapkan oleh VOC.

Bupati bertanggung jawab sebagai kepala daerah dan pemimpin tradisional. Pemerintah kolonial memiliki kendali atas bupati, yang mempengaruhi dinamika hubungan antara mereka sebagai pemimpin dan bawahan. Sebaliknya, rakyat pribumi dimiliki oleh bupati, yang menghasilkan hubungan tuan-hamba dalam sistem feodal. Bupati adalah orang yang paling cocok untuk berinteraksi dengan rakyat karena mereka paling memahami adat istiadat dan keadaan rakyatnya. Bupati diberi kekuasaan, kedudukan dan hak-hak istimewa dari pemerintah kolonial. Para bupati dikelilingi oleh kemegahan dan kemewahan dan memiliki kekuasaan yang besar. Bupati Parahyangan menganggap dirinya sebagai tuan dan penguasa atas wilayah yang dikuasainya (Atmadja & RAAA, 1940). Bupati, sebagai perangkat pemerintah lokal yang memiliki peran kunci dalam sistem *Preangerstelsel*, seharusnya bertindak sebagai perantara yang adil antara pemerintah kolonial dan petani. Namun, pada kenyataannya, beberapa bupati justru menggunakan kekuasaan mereka secara salah, dengan menindas para petani dan menerapkan hukuman yang berat bagi mereka yang tidak mampu membayar sewa tanah dan pajak. Bupati yang diberi kekuasaan mutlak atas penduduknya, justru memanfaatkan kewenangan tersebut untuk melakukan penindasan yang merugikan para petani, mereka dipaksa untuk menanam tanaman komersial dan hasil panen kemudian diambil dengan harga yang rendah sehingga menyebabkan petani hidup dalam ekonomi yang sulit (Rees, 1877). Berdasarkan penjelasan di atas mengenai bupati yang diberi hak istimewa oleh pemerintah kolonial Belanda justru dipakai untuk memperkaya diri sendiri sementara para petani menderita. Ini merupakan contoh dari ekstrimisme bupati masa *Preangerstelsel*, dimana kekuasaan digunakan untuk kepentingan pribadi bukan untuk kesejahteraan rakyat. Penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam melalui sebuah penelitian yang berjudul Parahyangan dan *Preangerstelsel*, khususnya Ekstrimisme Bupati pada Masa *Preangerstelsel* tahun 1830-1870 secara lebih komprehensif.

METODE PENELITIAN

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode historis, di mana pendekatan dalam memecahkan masalah didasarkan pada analisis jejak peristiwa sejarah atau data-data masa lampau. Penelitian historis memiliki empat langkah yaitu *pertama* heuristik, yakni peneliti berusaha mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang dapat dipertanggung jawabkan. Pada penelitian ini penulis menggunakan sumber sekunder dari jurnal-jurnal ilmiah yang diakses melalui google cendekia. Penulis juga menggunakan sumber primer berupa arsip dalam bentuk Koran yang berjudul *Verhoudingen In Dessa* dalam *Koran Het nieuws van den dag voor nederlandsch-Indie* yang diterbitkan Tahun 1940, buku, foto, dan majalah yang didapatkan dari laman resmi Delpher.nl dan KITLV. *Kedua* kritik sumber (verifikasi), yaitu penulis mengkaji sumber sejarah dari luar seperti melakukan pemeriksaan keaslian terhadap isi yang telah dikumpulkan. *Ketiga* interpretasi yaitu penulis menafsirkan dari data-data yang sudah di dapat dan sudah melalui tahap kritik. *Keempat* yaitu Historiografi yaitu penulis menuliskan cerita sejarah sesuai dengan sudut pandang penulis.

PEMBAHASAN

Awal Masuknya Kopi dan Penerapan *Preangerstelsel*

Budidaya kopi di Jawa sudah mulai sejak awal abad ke-18. Tanaman kopi bukan berasal dari Nusantara melainkan dari India Selatan yang dibawa oleh Gubernur Jenderal Joan Van Hoorn. Biji kopi tersebut ditanam di Nusantara ternyata dapat tumbuh dengan baik. Tingginya permintaan pasar terhadap kopi membuat VOC melakukan budidaya tanaman kopi di Parahyangan. Tahun 1705, VOC berhasil menguasai seluruh wilayah Parahyangan, wilayah Parahyangan sendiri meliputi Cianjur, Bandung, Sumedang, Limbangan, dan Sukapura.

Pada awalnya, budidaya tanaman kopi dianggap tidak terlalu memberatkan dan budidaya yang bebas pada awal abad ke-18, karena dapat dilakukan di mana pun, bahkan di belakang rumah atau di lereng gunung, tanpa mengganggu persawahan yang menanam tanaman pokok, seperti padi. kemudian budaya paksa menanam kopi dimulai tahun 1723 yang menyebabkan orang-orang pribumi mengalami kesulitan (de Klein, 1931). Penanaman kopi juga tidak memerlukan modal yang besar tetapi dengan pemahaman yang memadai tentang tanaman kopi, dapat menghasilkan kopi yang berkualitas tinggi. Namun, sebagai jenis tanaman baru budidaya kopi bukanlah hal yang mudah dikarenakan ada metode produksi dengan sistem terbaru. Hal ini berarti bahwa masyarakat Jawa akan terpengaruh oleh budidaya kopi selama jangka waktu yang lama Di pedalaman Batavia, kopi ditanam secara luas hingga ke dataran tinggi Parahyangan. Melihat tanaman kopi tumbuh dengan baik, pemerintah mulai mewajibkan penduduk untuk menanam tanaman kopi di semua lahan pertanian yang luasnya 7.130 m².

Campur tangan VOC mulai terlihat pada aspek kehidupan ekonomi masyarakat, termasuk pada bidang ekonomi. VOC mengawasi semua rencana dan praktik ekonomi di daerah koloninya, Cirebon. Kemudian VOC menanamkan pengaruh dan kekuasaannya pada kelompok-kelompok penguasa pribumi pada level yang rendah, yaitu para bupati dan bawahannya. Para bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan setoran wajib. Tanaman kopi menjadi tanaman baru di Hindia-Belanda, terutama di wilayah keresidenan Parahyangan yang dipengaruhi oleh VOC, dan satu-satunya tanaman yang dibudidayakan adalah kopi. Pada

awalnya, bisnis kopi dijalankan melalui pemimpin lokal yang memberikan uang muka sebagai jaminan, dan hasilnya dijual kembali kepada orang yang memberikan uang muka dengan harga tertentu (Anggastri, 2023).



Gambar 1: Kopi Arabica Java Preanger

Sumber: *Collectie KITLV*

Gambar di atas merupakan kopi Arabica Java Preanger yang diproduksi di Jawa Barat sejak abad ke-18 dikenal dengan cita rasanya yang unik, gurih, dan teksturnya yang lembut. Wilayah Jawa Barat, khususnya Parahyangan menjadi tempat diterapkannya kebijakan tanam paksa yang identik dengan penanaman kopi. Hal ini karena wilayah Parahyangan telah dieksploitasi oleh kolonial selama hampir dua abad melalui tanaman kopi. Keresidenan kopi Parahyangan membutuhkan banyak lahan dan tenaga kerja, sehingga produksinya paling tinggi dibandingkan dengan semua keresidenan lain di pulau Jawa (de Klein, 1931). Produk kopi selalu menghasilkan keuntungan besar. Misalnya, antara Tahun 1840 dan 1849, kopi memperoleh keuntungan sebesar 65 juta gulden, menjadikannya penyumbang kopi terbesar di Parahyangan (Fasseur, 1975). Sistem tanam paksa untuk mengeksport kopi, yang merupakan tanaman ekspor utama Pulau Jawa, menguntungkan pemerintah Belanda sebesar 80% dari nilai ekspor gula (Sondarika, 2015).

Dapat disimpulkan bahwa kopi pertama ada di Indonesia yaitu Pada masa pemerintahan VOC, daerah Parahyangan dijadikan sebagai lokasi pertama untuk menguji tanaman kopi. Hasilnya, kopi dari Parahyangan terbukti memiliki kualitas yang unggul. Oleh karena itu, pemerintah Belanda memutuskan untuk mengembangkan penanaman kopi di wilayah Hindia-Belanda guna memperluas produksi, mengingat potensi keuntungan yang besar dari ekspor kopi.

Ekstrimisme Bupati terhadap Masyarakat Parahyangan

Dalam jaringan pemerintah kolonial, ikatan bupati feodal dengan rakyatnya sangatlah penting. Meskipun pemerintah kolonial tidak memiliki akses langsung ke penduduk pribumi, bupati memiliki hubungan yang dekat dengan penduduk pribumi, Pemerintah kolonial menggunakan bupati sebagai perantara untuk berinteraksi dengan penduduk dalam kegiatan penanaman kopi. karena faktor ini. Keadaan yang ditemukan oleh VOC bupati Preanger menganggap dirinya sebagai tuan dan penguasa di wilayah yang dikuasainya. Para bupati hidup dalam kemegahan dan kemewahan yang diberikan oleh pemerintah kolonial. Para bupati memiliki kekuasaan yang besar dengan jangka waktu yang lama (Atmadja & RAAA, 1940). Sejak sistem tanam paksa diterapkan di Hindia Belanda, bupati

mendapatkan banyak pemasukan. Kekayaan bupati bertambah sehingga dapat menyelenggarakan kehidupan mewah dan megah, berbanding terbalik dengan rakyat pribumi, dimana mereka semakin menderita karena harus memikul beban tanam paksa yang berat. Pada masa pemerintah Van den Bosch wibawa para bupati naik, bahkan bupati berkuasa secara otonom (Clive, 1984).



Gambar 2: Bupati memantau pribumi dalam memetik kopi secara langsung
Sumber: *Collectie KITLV*

Bupati merupakan orang yang berinteraksi langsung kepada para pribumi. Bupati Preanger mempunyai hak untuk menuntut harta benda dari rakyat pribumi. Secara tradisional, Bupati dianggap sebagai penguasa de facto atas kelangsungan hidup dan mati rakyat pribumi. Selain itu, bupati mempunyai hak tertulis maupun tidak tertulis. Meskipun pemerintah kolonial tidak memungut sewa tanah dan kompensasi dalam bentuk apapun di wilayah Preanger, namun para petani kopi hanya diberi setengah dari upah yang dibayarkan kepada penduduk di daerah lain yang memasok kopi. Hal ini merupakan bagian dari sistem pengiriman wajib yang diterapkan oleh para bupati.



Gambar 3: Koran Hindia Belanda terbit Tahun 1940
Sumber: *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie*

Koran tersebut menjelaskan bahwa meskipun kepemilikan tanah secara resmi dihapuskan, bupati-bupati Priangan tetap mempertahankan kepemilikan tanah yang besar, yang dimana para bupati tetap menjadi pemilik tanah dan mempertahankan gaji yang tinggi untuk menjaga kedudukan mereka di tengah-tengah masyarakat pribumi. Sebagai contoh, Bupati Tjiandjoer yang terkenal sebagai bupati kaya raya pada zamannya yang menerima gaji sebesar *f* 3.600, gaji tersebut bahkan melebihi gaji wakil Presiden Dewan Hindia. Selain itu, bupati juga tetap menerima beberapa ton kopi setiap tahunnya. Dengan demikian, perilaku para bupati tersebut menyebabkan masyarakat pribumi merasa dirugikan. Hal ini menciptakan ketidakadilan sosial antara bupati dan masyarakat pribumi. Para bupati menikmati kemewahan dan status sosial yang tinggi sedangkan masyarakat pribumi mengalami kesulitan ekonomi yang mendalam.

Budaya Kopi di Preanger dijaga oleh para bupati, bupati menerima persentase yang cukup besar dari pendapatan kopi hingga mencapai ribuan euro di setiap tahunnya. Meskipun kepemilikan tanah secara resmi dihapuskan, para bupati masih memegang kendali yang besar atas tanah-tanah di wilayah Preanger, serta memperoleh gaji yang cukup besar dari industri kopi di wilayah Preanger (Atmadja & RAAA, 1940). Pada tahun 1836, para bupati dan pejabat Priangan menerima persentase berikut dari kopi yang diwajibkan sebanyak 90.000 pikul.

Tabel 1 persentase tarif untuk kopi di Keresidenan Priangan pada tahun 1836.

No	Pejabat	Persentase Tanaman untuk Tiap Pikul (125 pon)
1.	Bupati	<i>f.</i> 1,20
2.	Pejabat Bawahan Bupati	48 sen
3.	Residen	6 sen
4.	Asisten Residen	6 sen
5.	Kontrolleur	6 sen

Sumber: "Statistiek der residentie Preanger Regentschappen 1837", Preanger 29a/1 1837, ANRI.

Tabel 1 persentase tarif untuk kopi di Keresidenan Priangan pada tahun 1836.

No	Pejabat	Persentase Kopi untuk Tiap Pikul (125 pond, dalam <i>f.</i>)
1.	Lima Bupati	128.757,83
2.	Pejabat Bawahan Bupati	73.103,09
3.	Residen	933,81
4.	Asistan Residen	933,81
5.	Kontrolleur Kelas I	933,81
6.	Kontrolleur Kelas II	825,35
	TOTAL	205.487,70

Sumber: "Statistiek der residentie Preanger Regentschappen 1837", Preanger 29a/1 1837, ANRI.

Tabel 1 dan 2 menyajikan tarif persentase kopi di Karesidenan Priangan pada Tahun 1836. Tabel 1 menunjukkan persentase kopi yang harus diserahkan kepada berbagai para pejabat seperti lima bupati tersebut yang berasal dari Cianjur, Bandung, Sumedang, Sukapura dan Limbangan, pejabat bawahan bupati, Residen, Asisten Residen dan Kontrolleur. Setiap pejabat memiliki tarif yang berbeda untuk setiap pikul kopi yang dihasilkan. Contohnya, Bupati memiliki tarif sebesar f.1,20 untuk setiap pikul kopi, sementara pejabat bawahan bupati diberikan tarif sebesar 48 sen, dan pejabat administrasi lainnya masing-masing memiliki tarif sebesar 6 sen. Tabel 2 menyajikan total jumlah uang yang harus dibayarkan kepada setiap pejabat berdasarkan persentase kopi yang ditetapkan. Lima bupati tersebut, menerima sejumlah f.128.757,83 dari hasil produksi kopi sedangkan pejabat administrasi lainnya memiliki jumlah total yang harus dibayarkan kepada mereka. Total penerimaan keseluruhan pada tahun 1836 mencapai sejumlah f.205.487,70. Meskipun total pemasukan persentase setiap tahunnya tidak stabil, namun mengalami peningkatan yang berkaitan dengan volume produksi yang diserahkan ke gudang-gudang pemerintah kolonial (Fasseur, 1975). Pembayaran ini mencerminkan sistem pembagian hasil produksi kopi di Priangan pada waktu itu. Setiap pejabat menerima sejumlah uang berdasarkan persentase tertentu dari produksi kopi yang kemudian digunakan untuk menghasilkan pendapatan bagi pemerintah kolonial Belanda. Hal ini menunjukkan bahwa struktur pembayaran ini telah diatur secara rinci.

Bupati melakukan penindasan yang cukup merugikan rakyat pribumi, dimana para bupati menggunakan kekuasaannya untuk memaksa petani untuk menanam tanaman komersial kemudian hasil panen diambil dengan harga yang rendah sehingga menyebabkan petani hidup dalam kesengsaraan. Para bupati yang diberi kekuasaan penuh dan istimewa dari pemerintah kolonial justru sering menggunakan kekerasan atau mengancam para petani agar mentaati aturan tanam paksa. Petani yang memberontak dan menolak untuk bekerja kepada para bupati sering kali dikenakan hukuman yang keras. Bupati sering kali memperhatikan kepentingan pribadi daripada kesejahteraan petani, bupati juga menyalahgunakan kekuasaannya dan melakukan korupsi dalam pembelian dan penjualan hasil panen. Mereka mengambil keuntungan yang seharusnya menjadi hak milik petani. Para bupati diberikan keleluasaan sejak lama dalam mengatur penduduk pribumi (Atmadja & RAAA, 1940).

KESIMPULAN

Budidaya kopi sudah ada sejak abad ke-18, kopi merupakan tanaman yang bukan asli dari nusantara melainkan dari India Selatan yang dibawa oleh Gubernur Jenderal Joan Van Hoorn. Budidaya kopi pada awalnya merupakan budidaya yang bebas namun seiring berjalannya waktu berubah menjadi sistem tanam paksa yang disebut *Preangerstelsel*. *Preangerstelsel* pertama kali diterapkan pada abad ke-18 dan berdampak pada petani, bupati, dan masyarakat umum lainnya. Bupati menjadi tangan kanan VOC, sehingga memperoleh keuntungan besar. Namun, keadaan berubah, dimana rakyat dirugikan. Para bupati mendapat keuntungan dari *Preangerstelsel*, seperti bupati dari Cianjur, Sumedang, Bandung, Sukapura dan Limbangan yang menerima sekitar f128.757,83 dari hasil produksi kopi. bupati mempunyai wewenang untuk mengatur rakyat untuk bekerja keras tetapi menerima upah yang sedikit. Masyarakat Priangan banyak dipengaruhi oleh

tanaman kopi , terutama dalam hal ekonomi dan sosial. Munculnya sistem tanam paksa, seperti *Preangerstelsel* adalah contoh eksploitasi ekonomi dan tenaga kerja.. Namun dalam pengimplementasian *Preangerstelsel* juga menciptakan ketidakadilan sosial terutama hubungan antara bupati dan masyarakat pribumi. Para bupati diberi kekuasaan istimewa dari pemerintah kolonial, justru memanfaatkan posisi tersebut untuk memperkaya diri sendiri sementara rakyat pribumi hidup menderita akibat penindasan dan eksploitasi yang dilakukan oleh para bupati.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggastri, S. N. (2023). Preangerstelsel: Sistem Tanam Paksa Kopi Priangan Tahun 1723-1892. *Estoria: Journal Of Social Science and Humanities* 3(2), 445-459.
- Atmadja, S. N., & RAAA. (1940). *De Regenten-positie*. Bandung: Tidak ada.
- Clive, D. (1984). *The Policy of Administration of The Dutch in Java*. Kuala Lumpur: Oxford University.
- de klein, J. W. (1931). *Het Preangerstelsel (1677-1871) En Zijn Nawerjing*. Nederlands: Waltman.
- Fasseur. (1975). *Kultuurstelsel en Koloniale Baten: De Nederlandse Exploitatie Van Java 1840-1860*. Leiden: University Press.
- Oktasari, I. N. (2014). Perkebunan Kopi Rakyat di Jawa Timur 1920-1942. *Avatara Jurnal Pendidikan Sejarah* 2(1), 122-129.
- Pratiwi, H. N., & Miftahuddin. (2021). Perkembangan Perkebunan Nila di Karesidenan Kedu Masa Tanam Paksa 1840-1870. *Mozaik: Kajian Ilmu Sejarah* 12(1).
- Rees, O. V. (1877). *aan het rapport van het lid van den Raad van Nederlandsch-Indie, belast met eene zending naar die Regentschappen*. Batavia.
- Sondarika, W. (2015). Dampak Cultuurstelsel (Tanam Paksa) Bagi Masyarakat Indonesia dari Tahun 1830-1870. *Jurnal Artefak* (3)1.
- Statistiek der Residentie Preanger Regentschappen 1837, ANRI.
- Verhoudingen In Dessa, (1940), Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië <https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010984289:mpeg21:p005>
- Yuan, M. L. (2018). Perkebunan Kopi Di Karesidenan Banyumas Masa Tanam Paksa Tahun 1836-1849. *Ilmu Sejarah-SI* 3(7).